

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MEMBANGUN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Supandi

Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
dedisupandi07@gmail.com

Sadu Wasistiono

Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
sadu_ws@yahoo.com

Udaya Madjid

Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
udayamadjid@ipdn.ac.id

Andi Pitono

Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
andipitono70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 2) Faktor determinan yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa. 3) Upaya mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat dan 4) Alternatif strategi implementasi kebijakan yang harus dilakukan agar Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat efektif. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan penelitian adalah Kebijakan gerakan membangun desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan gerakan membangun desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolaborasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi gerakan membangun desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan gerakan membangun desa menghasilkan strategi koleborasi penta helix, strategi transparansi dan strategi peningkatan inovasi desa melalui didigalisasi desa, gerbang desa dan one vilage one prodauct. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Muchlis Hamdi (2014) masih relevan untuk digunakan, namun demikian dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat, model implementasi kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan kolaborasi (melalui skema penta helix), transparansi program (melalui edukasi masyarakat, komunitas mitra, dan pemantauan kebijakan), dan peningkatan inovasi untuk mewujudkan desa juara di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Gerakan Membangun Desa.

Abstract

This study describes the Implementation Strategy of the Village Building Movement Policy in West Java Province, Research problems: 1) Implementation of the Village Building Movement Policy. 2) The

determinant factors influencing the implementation of the Village Development Movement Policy. 3) efforts to overcome the factors that influence the implementation of the Village Building Movement policy in West Java Province and 4) Alternative policy implementation strategies that must be implemented so that the Village Building Movement Policy in West Java Province is effective. The research method used by researchers is descriptive with a qualitative approach. The result of the research is that the village development movement policy has been implemented in all districts in West Java, indicated by a decrease in the number of underdeveloped villages and developing villages in West Java Province, and increased to become developed villages and independent villages. The implementation of the village building movement policy in West Java Province is influenced by productivity, linearity, and efficiency factors. Meanwhile, the determinant factors that influence the implementation of the village building movement policy include policy substance, behavior of executors, network interactions, target group participation and resources. While efforts to overcome obstacles that affect the implementation of the village building movement policy are institutional readiness, program readiness, and HR readiness as well as penta helix collaboration. There are three dominant factors that become obstacles in the implementation of the village building movement, namely time, regulation, and caution. SOAR Strategy Analysis related to the implementation of village building movement policies resulted in a penta helix collaboration strategy, transparency strategy and strategies for increasing village innovation through village digitalization, village gates and one village one product. The findings of this study are that Muchlis Hamdi's (2014) policy implementation model is still relevant to use, however, in the implementation of the village building movement policy in West Java Province, the policy implementation model needs to be complemented by a collaborative approach (through the penta helix scheme), program transparency (through community education, partner communities, and policy monitoring), and increasing innovation to create champion villages in West Java Province.
Keywords: Implementation of Village Building Policies and Movements.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Reformasi pemerintahan daerah dengan memilih model desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah dipertegas dengan terbitnya tiga UU Pemerintahan Daerah dalam rentang waktu 15 tahun belakang ini. Ketiga UU tentang pemerintahan daerah tersebut yakni UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sekaligus menandakan sistem pemerintahan daerah di Indonesia memasuki babak baru, yakni pergeseran dari corak penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sentralistik mengarah ke sistem pemerintahan daerah yang desentralistik.

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Disadari benar oleh pemerintah bahwa masyarakat desa hingga saat ini belum merasakan secara optimal apa yang menjadi

¹ Baharuddin Thahir, Sadu Wasistiono, Prio Teguh, dan Arwanto H. Ginting, Penggunaan Gerakan membangun desa Tahun 2015-2018 dan Strategi Pendampingannya (Studi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat), Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, Mei 2020, hlm 280-290.

harapan dan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.² Upaya peningkatan kesejahteraan menurut Nurcholis, masyarakat pedesaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia melainkan juga pemecahan masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.³

Pembangunan Desa di Indonesia pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, dikembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu kuatnya masyarakat desa dalam keberdayaan kehidupan dan proses kemajuan desa dengan memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam 5 (lima) status, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Klasifikasi desa dalam 5 (lima) status tersebut untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang dibentuk pada tahun 1950 atas penghapusan Pemerintah Daerah Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah provinsi Jawa Barat sebesar 35.377,76 Km² yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5312 desa. Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa atau 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ikhtiar dan langkah-langkah untuk pembangunan di Jawa Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang memuat janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**.

² Amir Muhiddin, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Studi Kesiapan Desa Menerima Gerakan membangun desa Di Kabupaten Gowa), Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2017, hlm 1

³ Desy Amelia Nurgiartha dan Weni Rosdiana, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Labuhan Kecamatan Berondong Kbupaten Lamongan”, jurnal Ilmu sosial dan Hukum, Vol,7, No.1 (2019), Universitas Negri Surabaya, hlm. 1-8.

Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi: 1. Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya; 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan; 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata; 5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 6. Infrastruktur konektivitas wilayah ; 7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa); 8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah); 9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Salah satu prioritas kepala daerah yang didukung oleh DPM-Desa adalah Gerakan membangun desa (Gerbang desa). Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri yaitu Desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Desa, melalui kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Gerbang Desa meliputi:⁴

1. Satu Desa Satu BUMDes

Satu Desa Satu BUMDes adalah upaya membentuk atau mengembangkan BUMDes di seluruh desa Jawa Barat.

2. *One Village One Company* (OVOC)

OVOC adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan mengoptimalkan peran BUMDesa dalam mengelola potensi Desa.

3. Desa Digital

Desa digital sebagai upaya membangun jaringan internet di desa khususnya desa blank spot untuk memastikan akses informasi yang setara dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi.

4. Patriot Desa

Patriot Desa adalah pemuda Jawa Barat yang lulus pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.

5. CEO BUMDesa (*Chief Executive Officer*)

CEO BUMDesa adalah sarjana lulusan PTN/PTS (fresh-graduate) yang bertugas mendampingi BUMDesa untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Kampung Keluarga Juara

Kampung Keluarga Juara merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat melalui penurunan angka kelahiran dan meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) Warga desa.

⁴ Rencana Strategis (RENSTRA) DPM- Desa Tahun 2018-2023 Hal 39

7. Desa Sejahtera Mandiri

Desa sejahtera mandiri adalah masyarakat desa yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan swasembada, berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa dan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi produktifitas desa.

8. Desa Wisata

Desa wisata adalah upaya mendorong desa yang memiliki Potensi alam yang bagus menjadi daerah wisata melalui pengelolaan daerah wisata sebagai destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan melalui pengembangan Desa Wisata.

9. Sapa Warga

Sapa Warga merupakan bentuk inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menampung aspirasi warga Jabar melalui pengembangan IT dan Media Sosial.

10. Mobil Siaga

Mobil siaga yang berganti nama menjadi mobil aspirasi masyarakat juara (MASKARA) adalah bantuan mobil bagi desa dengan konsep multifungsi untuk memenuhi kebutuhan primer warga desa antara lain; mengantar jenazah, mobil hiburan, angkutan pertanian, serta panggung untuk hajatan.

Program Gerakan Membangun Desa merupakan pembangunan dengan konsep Desa Unggul dan Berkelanjutan yang diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan sebutan Program Desa Juara untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di desa. Desa di Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang penting yang wajib dijamin kesejahteraannya karena dari total penduduk Jawa Barat yaitu 48.037.827 jiwa di tahun 2018, 34,31 % diantaranya tinggal di perdesaan. Untuk mewujudkan Desa Juara, desa-desa di Provinsi Jawa Barat telah memiliki beberapa modal dasar berupa sumber daya. Modal dasar sumber daya tersebut adalah terdapatnya 51.415 Unit Posyandu, 5.957 LPM, PKK, DS/Kel, 2.785 Bumdes, 1.844 Pasar Desa, 296.855 Kader Poyandu, 17 Ribu Kader Pemberdayaan Masyarakat, 835.476 Kader Umum PKK, dan 2.929 Pendamping Desa. Namun demikian, perkembangan program Desa Juara di Provinsi Jawa Barat masih menyisakan permasalahan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berada pada angka 7,45 % yang merupakan angka kemiskinan yang tinggi.

Berikut ini adalah gambar potensi sumber daya di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Kelembagaan Masyarakat Desa di Provisi Jawa Barat

626 KECAMATAN	INDEKS DESA MEMBANGUN JAWA BARAT					
5.312 DESA	586 MANDIRI	2.102 MAJU	2.606 BERKEMBANG	18 DESA TERTINGGAL	0 DESA SANGAT TERTINGGAL	
645 KELURAHAN	KLASIFIKASI DS/KEL			TK. PERKEMBANGAN DS/KEL		
	175 SWASEMBA DA	936 SWAKARYA	4000 SWADAYA	1099 CEPAT BERKEMBANG	3286 BERKEMBA NG	940 KURANG BERKEMBA NG
	51415 UNIT POSYANDU	5957 LPM, PKK, DS/KEL	2785 BUMDES		1844 PASAR DESA	
	296.855 KADER POSYANDU	673 PENDAMPING KADER POSYANDU	17 ribu KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	835.476 KADER UMUM PKK	2928 PENDAMPING DESA	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar, Tahun 2021

Tingkat perkembangan desa melalui klasifikasi desa di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan isu empiris tentang perkembangan program Gerakan Membangun Desa. Klasifikasi desa menunjukkan tingkat kemajuan yang ada di desa tersebut. Desa dengan klasifikasi tertinggal memiliki permasalahan yang jauh sangat kompleks dibandingkan desa dengan klasifikasi maju. Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari 5312 desa di Provinsi Jawa Barat terdapat 11,03 persen Desa Mandiri, 39,57 persen Desa Maju, 45,06 persen Desa Berkembang, dan 0,33 persen Desa Tertinggal. Berikut tabel 1.2. perkembangan indeks desa membangun di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2. Indeks Desa Membangun di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa per Kategori			
	Mandiri	Desa Maju	Berkembang	Tertinggal
Kab. Bogor	48	188	180	-
Kab. Sukabumi	19	156	206	-
Kab. Cianjur	10	115	223	6
Kab. Bandung Barat	40	95	30	-
Kab. Bandung	86	129	55	-
Kab. Garut	19	117	285	-
Kab. Tasikmalaya	22	65	256	8
Kab. Ciamis	45	120	93	-
Kab. Kuningan	36	160	165	-

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa per Kategori			
	Mandiri	Desa Maju	Berkembang	Tertinggal
Kab. Cirebon	42	185	185	-
Kab. Majalengka	63	180	87	-
Kab. Sumedang	31	103	136	-
Kab. Indramayu	26	151	132	-
Kab. Subang	22	123	100	-
Kab. Purwakarta	16	62	105	-
Kab. Karawang	12	79	202	4
Kab. Bekasi	22	32	126	-
Kab. Pangandaran	11	42	40	-
Kota Banjar	16	0	0	-
Jumlah	586	2,102	2,606	18

Sumber: <https://portaldatadesa.jabarprov.go.id/> diakses 20 Oktober 2022

Kondisi klasifikasi desa di atas juga diperparah dengan belum semua desa memiliki manajemen ekonomi desa yang mampu mendukung kemandirian ekonomi desa. Dari total 5.312 desa di Jawa Barat, hanya 2.785 desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa. Sementara itu, 50 % desa dari total 5.312 desa di Provinsi Jawa Barat belum menerapkan SISKEUDES (sistem keuangan Desa), walaupun pemerintah telah memberikan bantuan gerakan membangun desa tapi masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2021 bantuan untuk gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.990.622.942.000. Alokasi gerakan membangun desa per Kota/ Kabupaten se Provinsi Jawa Barat terlihat dalam tabel 3. berikut :

**Tabel 3. Rekapitulasi Alokasi Gerakan membangun desa Tahun Anggaran 2021
Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat (dalam ribuan rupiah)**

NO	KOTA/ KABUPATEN	ALOKASI GERAKAN MEMBANGUN DESA
1	Kab. Bandung	334.046.576
2	Kab. Bekasi	264.332.147
3	Kab. Bogor	523.393.765
4	Kab. Ciamis	263.615.735
5	Kab. Cianjur	430.246.084
6	Kab. Cirebon	454.574.807
7	Kab. Garut	506.831.553
8	Kab. Indramayu	396.162.113
9	Kab. Karawang	349.344.485
10	Kab. Kuningan	305.029.334
11	Kab. Majalengka	391.668.514
12	Kab. Purwakarta	170.355.883

NO	KOTA/ KABUPATEN	ALOKASI GERAKAN MEMBANGUN DESA
13	Kab. Subang	220.076.242
14	Kab. Sukabumi	377.384.015
15	Kab. Sumedang	227.319.620
16	Kab. Tasikmalaya	402.887.661
17	Kota Bandung	-
18	Kota Bekasi	-
19	Kota Bogor	-
20	Kota Cirebon	-
21	Kota Depok	-
22	Kota Sukabumi	-
23	Kota Tasikmalaya	-
24	Kota Cimahi	-
25	Kota Banjar	25.369.574
26	Kab. Bandung Barat	257.381.269
27	Kab. Pangandaran	90.603.565
JUMLAH		5.990.622.942

Sumber: Kementerian Keuangan, Daftar Alokasi Gerakan membangun desa Prov. Jabar 2021

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli yang menegaskan arti penting pembangunan desa, hasil penelitian para peneliti terdahulu yang menunjukkan beragam permasalahan dalam praktek kebijakan pembangunan desa, dan adanya fakta penyelenggaraan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan kajian mendalam dengan topik: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ilmu Pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).⁵ Sedangkan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.⁶ Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan

⁵ Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 8.

⁶ Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 11.

yang diperintah). 2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah 3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.⁷ Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.⁸

A. Teori Manajemen Pemerintahan Daerah.

Secara pengertian, menurut Budi Supriyanto, manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹ Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik¹⁰ mengatakan bahwa manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

⁷ Riyaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, 2002 Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 14-16.

⁸ Riyaas Rasyid, op. cit, hal. 59.

⁹ Goran Hayden & Julius Court. 2002. *Governance and Development: World Government Survey, Discussion Paper 1*. New York: United Nation University.

¹⁰ Bambang Istianto, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Teori Kebijakan Publik.

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.¹¹ Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik.¹² Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan public, (2) mengembangkan proposal kebijakan public, (3) melakukan advokasi kebijakan public, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.¹³

C. Teori Kebijakan Publik.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*", yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai "kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan". Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁴

D. Teori Implementasi Kebijakan Publik.

Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu

¹¹ Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2003, h.6

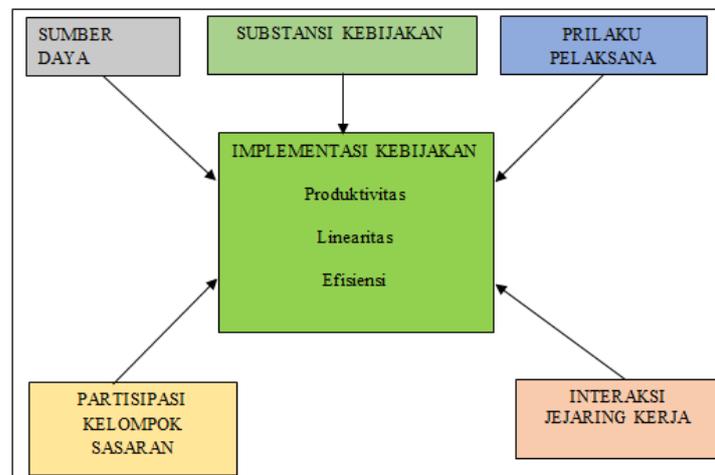
¹² Gerston, L,N, Public Policy Making in A Democratic society: A Guide to CIVIC Engaagement (New York: M.E Sharp, inc, 1992), p.5

¹³ William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction (New Jersey: Prentice Hal, inc., 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003) h.98.

¹⁴ Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17

subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.¹⁵ Adapun kebijakan publik menurut George C. Edward III dan shakansky dalam buku wahab mengatakan “apa yang di katakana dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak di lakukan oleh pemerintah adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Dengan kata lain, berdasarkan dengan pandangan tersebut kebijakan public yang merupakan keputusan yang diambil dan dibuat tidak hanya oleh satu aktor saja melainkan juga dapat dibuat oleh beberapa aktor yang saling berkaitan dan saling terlibat dalam kepentingan dari sesuatu kebijakan public yang dibuat tersebut. Implementasi merupakan tahapan penting adanya kebijakan publik, pada tahap ini kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah dengan baik kemudian akan dilaksanakan sehingga juga mampu menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Gambaran tahapan implementasi yang dikemukakan oleh Matland adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Dimensi dan Determinan Implementasi Kebijakan



Sumber: Hamdi Muchlis, Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 107.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan mengenai model implementasi model alternatif milik Matland diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa poin utama dalam proses implementasi terletak pada kerjasama antar pelaksana maupun pendamping lapang. Baik pelaksana ditingkat pusat atau perumus kebijakan, pelaksana mitra hingga kelompok sasaran memiliki partisipasi yang penting guna mencapai keberhasilan implementasi. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dapat dilihat dari tiga dimensi yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi.

¹⁵ Wahab, solichin Abdul. Analisis Pengantar kebijakan Publik. Malang: UMM pres 2008. Hal. 51

E. Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah Konsep Model Helix

Pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model *Triple Helix*. Berdasarkan gagasan yang sama mengenai interaksi antara kontributor inovasi, yang disebut sebagai bidang kelembagaan (Universitas, Industri, dan Pemerintah), Etzkowitz dan Leydesdorff mengembangkan model *Triple Helix* yang mengadopsi model inovasi spiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (publik, swasta dan akademis) pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione). Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen pengetahuan utama; ii) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di pasaran; dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi. Model *Triple Helix* menyiratkan kompleksitas yang meningkat dalam hal elemen operasional utama, atau komponen, dan hubungan di antara elemen-elemen ini dengan mempertimbangkan fungsinya. Ranga dan Etzkowitz mendefinisikan sebagai komponen dasar (yaitu aktor) inovator individu dan lembaga inovator, Penelitian dan Pengembangan dan Non-Riset Inovator Pengembangan, dan lembaga hibrida '*single-sphere*' dan '*multi-sphere*'.

Carayannis dan Campbell menyatakan pentingnya kebijakan dan praktik pemerintah, universitas dan industri serta masyarakat sipil saling berinteraksi secara cerdas, efektif dan efisien. Secara paralel, konsep *Quadruple Helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari lingkungan TH (UNI, IND, dan GOV) dan dengan meresmikan peran masyarakat sipil. Akademisi dan perusahaan menyediakan kondisi yang diperlukan untuk ekosistem inovasi terpadu. Pemerintah menyediakan kerangka peraturan dan dukungan finansial untuk definisi dan implementasi strategi dan kebijakan inovasi. Carayannis dan Campbell menyatakan pentingnya kebijakan dan praktik pemerintah, universitas dan industri serta masyarakat sipil saling berinteraksi secara cerdas, efektif dan efisien. Secara paralel, konsep *Quadruple Helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari lingkungan TH (UNI, IND, dan GOV) dan dengan meresmikan peran masyarakat sipil. Akademisi dan perusahaan menyediakan kondisi yang diperlukan untuk ekosistem inovasi terpadu. Pemerintah menyediakan kerangka peraturan dan dukungan finansial untuk definisi dan implementasi strategi dan kebijakan inovasi. Masyarakat sipil tidak hanya menggunakan dan menerapkan pengetahuan, dan menuntut inovasi dalam bentuk barang dan jasa, namun juga menjadi bagian aktif dari sistem inovasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bekerja sebagai faktor pendukung partisipasi *bottom-up*

masyarakat sipil.¹⁶ Pendekatan *Quadruple Helix* (QH) jauh dari dianggap sebagai konsep yang mapan dalam penelitian dan kebijakan inovasi.

Quintuple Helix adalah model inovasi yang dapat mengatasi tantangan pemanasan global yang ada melalui penerapan pengetahuan dan pengetahuan karena berfokus pada pertukaran sosial dan pertukaran pengetahuan di dalam subsistem negara atau negara tertentu. Model inovasi 'nonlinier' dari *Quintuple Helix*, yang menggabungkan pengetahuan, pengetahuan, dan sistem lingkungan alami bersama-sama ke dalam kerangka 'interdisipliner' dan 'transdisipliner', dapat memberikan model langkah demi langkah untuk memahami Manajemen berbasis kualitas pembangunan yang efektif, memulihkan keseimbangan dengan alam, dan membiarkan generasi masa depan memiliki kehidupan pluralitas dan keragaman di bumi. Singkatnya, *Quintuple Helix* mewakili model yang sesuai dalam teori dan praktik yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memahami kaitan antara pengetElemen penyusun paling penting dari *Quintuple Helix* - terlepas dari 'agen manusia' aktif - adalah sumber pengetahuan ', yang, melalui sirkulasi (yaitu sirkulasi pengetahuan) antara subsistem sosial (begitu kaya), Perubahan inovasi dan pengetahuan dalam masyarakat dan ekonomi. *Quintuple Helix*, dengan demikian, memvisualisasikan interaksi kolektif dan pertukaran pengetahuan dalam sebuah negara (*nation-state*) melalui lima sistem subsistem berikut (yaitu, heliks): (1) sistem pendidikan, (2) sistem ekonomi, 3) lingkungan alam, (4) masyarakat berbasis media dan berbasis budaya (juga masyarakat sipil), (5) dan sistem politik. Untuk menganalisis keberlanjutan dalam *Quintuple Helix* dan untuk membuat penentuan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan, berarti masing-masing dari kelima subsistem yang dijelaskan (*helix*) memiliki aset ahuan dan inovasi, untuk mempromosikan pembangunan yang langgeng.

F. Konsep Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Definisi Desa, dengan keluarnya Undang-undang tentang desa telah berubah maknanya, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa tersebut telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat

¹⁶ Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). *Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69. <https://doi.org/10.4018/jesd.2010010105>.

berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (*entitas*) hukum.¹⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka namun data tersebut berasal naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variable secara lepas, tidak menghubungkan antara variable yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematis oleh karena itu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara data yg sebenarnya dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Rumusan masalah yang akan diteliti menentukan pengamatan dan penelitian secara mendalam. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

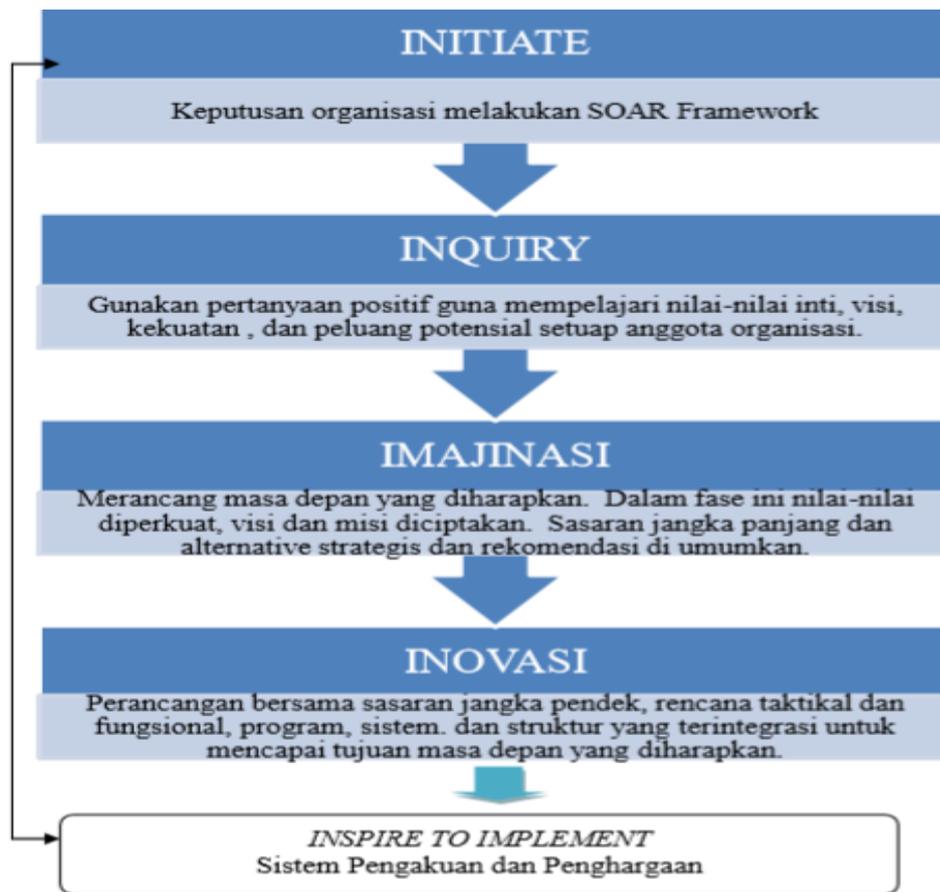
Data primer diperoleh dari informan yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Kebijakan Gerakan Membangun Desa. Data dimaksud berupa bagaimana implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau *theoretical sampling* cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Untuk penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan *open coding* dan *axial coding*. *Open coding* adalah proses membaca data dari hasil wawancara, lalu melalui beberapa data tersebut yang memiliki makna, serta mengkategorisasi data-data bermakna berdasarkan label yang kita berikan. Sedangkan *axial coding* adalah proses mengidentifikasi relasi

¹⁷ Eko Sutoro, dkk., *Desa Membangun Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), h. 34

antar kategori yang telah kita labeli pada tahap *open coding*. Analisis SOAR bagi perencanaan strategis dimulai dengan inisiatif (keputusan untuk memilih SOAR) kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan (*inquiry*) yang menggunakan pertanyaan positif guna mempelajari nilai-nilai inti, visi, kekuatan, dan *inquiry* gunakan pertanyaan positif guna mempelajari nilai-nilai inti, visi, kekuatan, dan peluang potensial setiap anggota organisasi. Imajinasi merancang masa depan yang diharapkan. Dalam fase ini nilai-nilai diperkuat, visi dan misi diciptakan. Sasaran jangka panjang dan *alternative strategy* dan rekomendasi untuk di umumkan.

Berikut tahapan analisis SOAR:

Gambar 2. Tahap Analisis SOAR



Sumber: Stavros, 2007

Selanjutnya ditentukan matrix Analisis SOAR dibagi menjadi 4 kondisi sebagai berikut:

Tabel 4. Matrik SOAR

Internal	Strength Daftar faktor kekuatan Internal	Oppurtunities Daftar peluang eksternal
Eksternal	Strategi SA Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai aspirasi	Strategi OA Ciptakan strategi yang berorientasi kepada aspirasi yang diharapkan untuk memanfaatkan Peluang
Aspirasi Daftar faktor harapan dari internal	Strategi SR Ciptakan strategi yang berdasarkan kekuatan untuk mencapai Hasil yang terukur	Strategi OR Strategi yang berorientasi kepada kesempatan untuk mencapai visi
Result Daftar hasil yang terukur untuk diwujudkan		

Sumber: Stavros, 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai tahun 2021 implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat masih menyisakan 18 desa tertinggal yang pada tahun 2019 jumlahnya 929 desa. Implementasi Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat digunakan parameter Indeks Desa Membangun dengan berpedoman kepada Permendesa PDTT No 2 Tahun 2016. Indeks desa membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan (IK) Sosial, IK Ekonomi dan IK Lingkungan/ Ekologi. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju atau Desa Mandiri perlu kerangka kerja Pembangunan Berkelanjutan di mana Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, dan Aspek Ekologi/Lingkungan menjadi kekuatan, yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk “Mensejahterakan Kehidupan (Masyarakat) Desa”.¹⁸ Berikut jumlag desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat sampai pada tahun 2021:

Tabel 5. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai IDM 2021	Strata Desa 2021
1	Kab. Cianjur	Cidaun	Cibuluh	0,5421	TERTINGGAL
2	Kab. Cianjur	Cidaun	Gelarpawitan	0,5840	TERTINGGAL
3	Kab. Cianjur	Cidaun	Gelarwangi	0,5981	TERTINGGAL

¹⁸ Permendesa PDTT No 2 Tahun 2016

4	Kab. Cianjur	Cidaun	Jayapura	0,5897	TERTINGGAL
5	Kab. Cianjur	Cikadu	Sukamanah	0,5984	TERTINGGAL
6	Kab. Cianjur	Leles	Sirnasari	0,5432	TERTINGGAL
7	Kab. Karawang	Ciampel	Tegallega	0,5640	TERTINGGAL
8	Kab. Karawang	Cibuaya	Cemarajaya	0,4940	TERTINGGAL
9	Kab. Karawang	Cibuaya	Gebangjaya	0,5443	TERTINGGAL
10	Kab. Karawang	Cilamaya Wetan	Muarabaru	0,5824	TERTINGGAL
11	Kab. Tasikmalaya	Bojonggambir	Campakasari	0,5952	TERTINGGAL
12	Kab. Tasikmalaya	Cigalontang	Cidugaleun	0,5452	TERTINGGAL
13	Kab. Tasikmalaya	Cigalontang	Parentas	0,5489	TERTINGGAL
14	Kab. Tasikmalaya	Cigalontang	Sirnalalih	0,5697	TERTINGGAL
15	Kab. Tasikmalaya	Cipatujah	Nagrog	0,5395	TERTINGGAL
16	Kab. Tasikmalaya	Cipatujah	Pameutingan	0,5894	TERTINGGAL
17	Kab. Tasikmalaya	Cipatujah	Sukahurip	0,5581	TERTINGGAL
18	Kab. Tasikmalaya	Mangunreja	Margajaya	0,5848	TERTINGGAL

Sumber: Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/> 2023

Berdasarkan data pada tabel 5. diperoleh gambaran dari 18 desa tertinggal tahun 2021 ada 3 desa yang memiliki nilai terendah dari 3 Kabupaten Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang dan Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian desa yang dijadikan lokus penelitian ini di fokuskan kepada 3 desa tertinggal dengan raihan indeks desa membangun paling rendah di 3 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berikut Desa dengan IDM Terendah:

Tabel 6. Desa Tertinggal IDM Terendah di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai IDM 2021	Strata Desa 2021
1	Kab. Cianjur	Cidaun	Cibuluh	0,5421	TERTINGGAL
2	Kab. Karawang	Cibuaya	Cemarajaya	0,4940	TERTINGGAL
3	Kab. Tasikmalaya	Cipatujah	Nagrog	0,5395	TERTINGGAL

Sumber: Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/>, diolah, 2023

Implementasi kebijakan gerakan membangun desa di 3 desa terendah dalam raihan indeks desa membangun (IDM) adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Deskripsi Setiap Indikator Pelaksanaan Gerbang Desa, Desa Tertinggal IDM Terendah di Provinsi Jawa Barat.

No	Kegiatan Gerbang Desa	Kelompok Sasaran	Penjelasan Informan
1	EKONOMI	<i>One Village One Company</i> (OVOC)	BUMDes sudah dibentuk sejak 2019, dan saat ini masih berjalan.
		<i>One Pesantren One Product</i> (OPOP)	Tidak terdapat pesantren sehingga OPOP tidak terbentuk.
		Patriot Desa	Sudah dibentuk tahun 2021 dan aktif menjalankan fungsinya.
		CEO BUMDes	CEO BUMDes sudah definitif dan menjalankan fungsinya
		Kredit Masyarakat Sejahtera	Belum ada program yang diajukan.
2	PENDIDIKAN	Desa Literasi	Skala formal/besar belum ada. Namun ada inisiasi dari masyarakat dengan membuka pojok baca untuk meningkatkan literasi mesyarakat desa.
		Satu Desa Satu Hafizh (Sadesha)	Sudah ada
		Desa Digital	Belum karena ada kendala jaringan (<i>blank spot</i>) di beberapa dusun. Ini karena kontur tanah/ topografi desa (daerah pegunungan) dan luasnya wilayah desa.
3	KESEHATAN	Layad Rawat	Program dari provinsi belum ada, namun sudah ada inisiasi dari Kabupaten Cianjur.
		Mobile Puskesmas (MPUS)	Tidak ada, karena belum memiliki puskesmas.
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Desa Tangguh Bencana	Belum ada. Baru sosialisasi untuk mengikuti pelatihan BPBD Provinsi, termasuk pengamanan dan asesmen

No	Kegiatan Gerbang Desa	Kelompok Sasaran	Penjelasan Informan
			kerugian.
		Sekoper Cinta	Sudah ada, oleh ibu-ibu PKK.
		Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara)	Belum ada, karena status desa belum masuk kriteria.
		Pendamping Kader Posyandu (PKP)	Sudah ada.
		Motekar	Sudah ada.
5	INFRASTRUKTUR	Jalan Desa Mulus (Jamu)	Belum mulus, akses keluar masuk hanya satu jalan, dari jalan provinsi masuk ke desa sangat jauh, dalam kondisi hujan jalan provinsi dan jalan kabupaten hancur/ makadam atau masih berbatu sehingga menyulitkan lintas jalan. Jalan di dalam desa masih sangat tidak mendukung.
		Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa)	Jembatan gantung tersedia sumbangan dari Provinsi Jawa Barat.
		Kampung Caang	Sudah tercapai 100%.
6	PEMERINTAHAN	<i>Jabar Quick Response (JQR)</i>	Sudah berjalan, inisiatif masyarakat bahkan sudah tinggi sehingga laporan sering dilakukan oleh masyarakat langsung.
		Si Rampak Sekar	Ada dan berjalan.
		Sapa Warga	Sudah ada.
		Penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa	Sudah ada, tercermin dalam struktur organisasi desa.

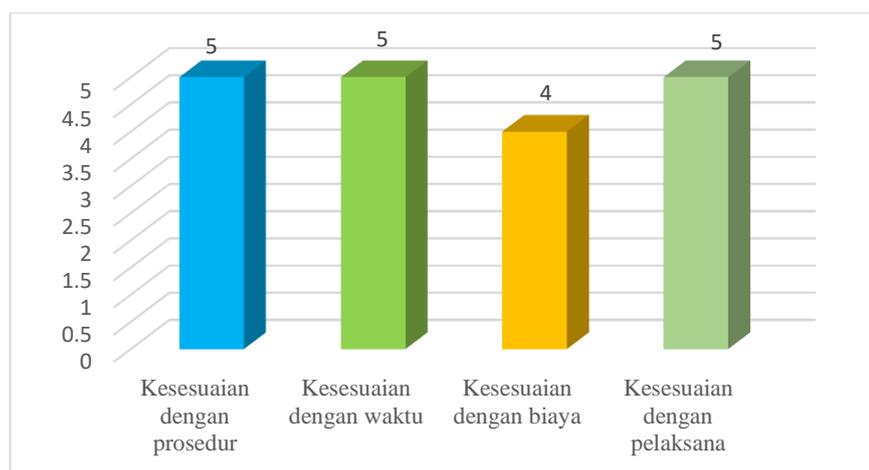
Sumber: Transkrip Wawancara Dengan Kepala Desa Cibuluh, Cemarajaya dan Nagrog, 2023 diolah

Dari transkrip wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kelompok sasaran telah memenuhi kriteria implementasi Gerakan Membangun Desa. Selain wawancara, melalui kuesioner yang diisi dengan *self-administered* terkait implementasi Gerakan Membangun Desa di Desa Cibuluh dan kedua desa tertinggal lainnya juga terungkap beberapa fakta dari informan, yang dikelompokkan berdasar beberapa dimensi diantaranya pada Tingkat Kesesuaian

Implementasi, Efektivitas Penggunaan Aset, Kompetensi Aparat Desa, dan Ketersediaan Alat dan Teknologi.

Tingkat kesesuaian implementasi mencakup empat dimensi, yaitu kesesuaian dengan prosedur, kesesuaian dengan waktu, kesesuaian dengan biaya, dan kesesuaian dengan pelaksana. Penggambaran tingkat kesesuaian implementasi Gerakan Membangun Desa di Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog diukur dengan skala Likert dengan rentang 1 (sangat tidak sesuai) sampai 5 (sangat sesuai).

Gambar 3. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

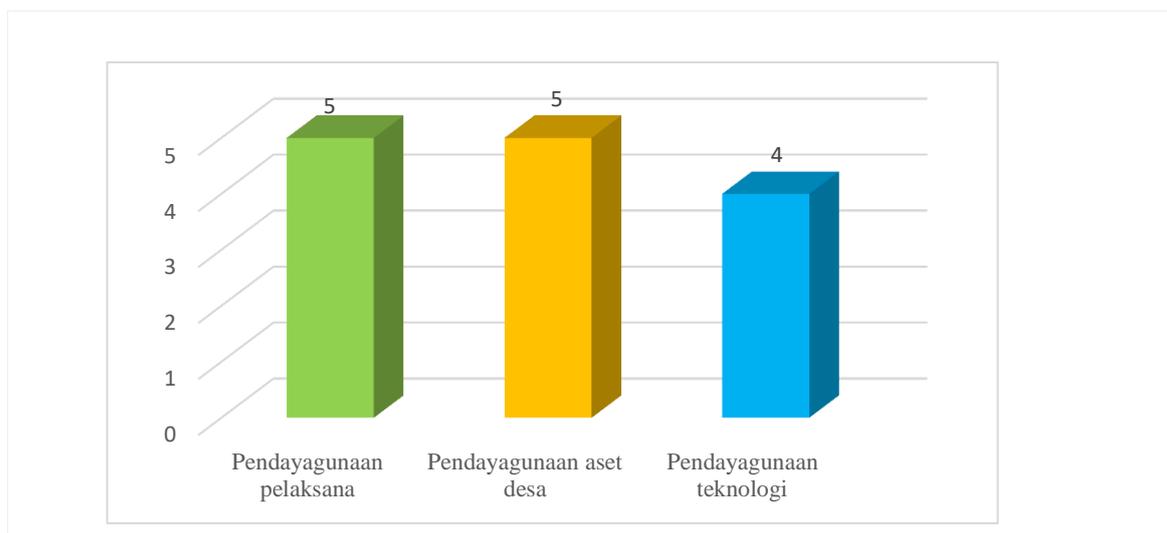


Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa), seluruh indikator atau kelompok sasaran telah memenuhi kebutuhan Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi. Tingkat kesesuaian implementasi rata-rata mencapai 4.0 dari skala 5.

Efektivitas Penggunaan Aset Desa yang mencakup sumber daya manusia (SDM) pelaksana, aset fisik desa, dan teknologi dalam implementasi Gerakan Membangun Desa di Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog tersebut diukur dengan skala Likert dengan rentang 1 (sangat tidak efektif) sampai 5 (sangat efektif) menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa), pendayagunaan aset desa telah mencapai efektivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi.

Gambar 4. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

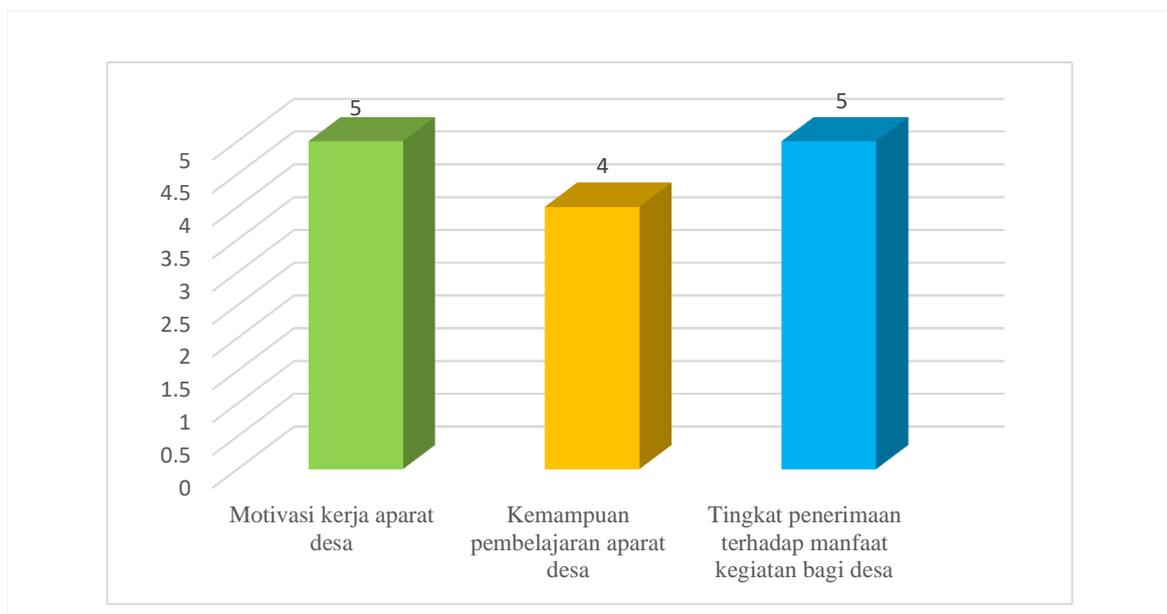


Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa), pendayagunaan aset desa telah mencapai efektivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi. Tingkat efektivitas pendayagunaan aset desa rata-rata mencapai 4.67 dari skala 5.

Kompetensi aparat desa mencerminkan kemampuan aparat desa dalam melaksanakan Gerakan Membangun Desa. Kompetensi aparat desa mencakup motivasi kerja aparat desa, kemampuan pembelajaran aparat desa, dan tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan Gerakan Membangun Desa bagi desa. Kompetensi aparat desa dalam implementasi Gerakan Membangun Desa di Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog tersebut diukur dengan skala Likert dengan rentang 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi).

Gambar 5. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi

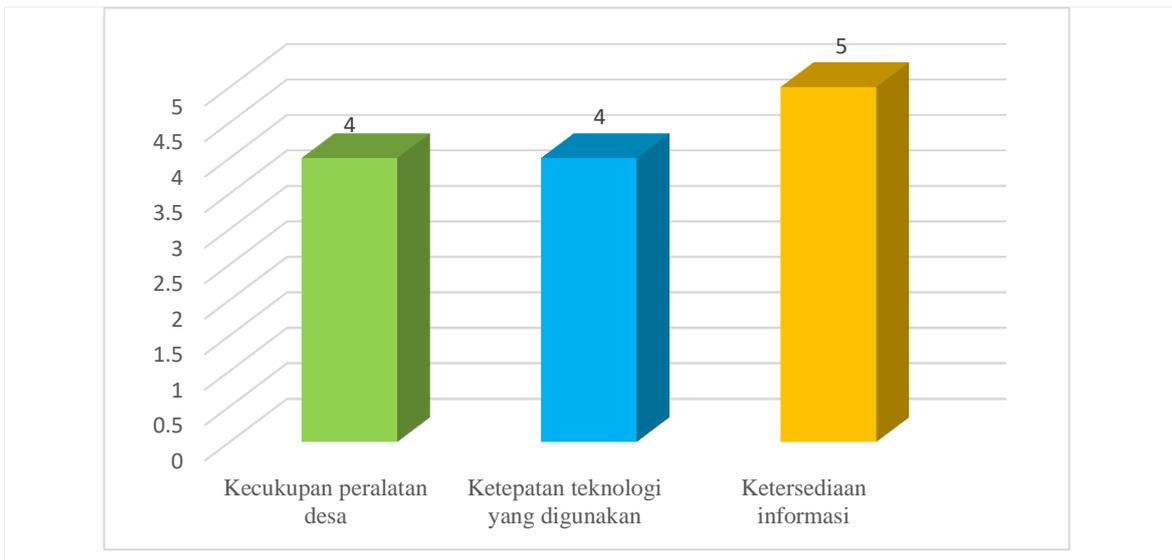


Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa), ketersediaan dan ketepatan alat dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi adalah tersedia cukup dan tepat. Ketersediaan dan ketepatan alat dan teknologi rata-rata mencapai 4.33 dari skala 5.

Ketersediaan alat dan teknologi mencerminkan kecukupan dan ketepatan alat dan teknologi serta informasi dalam melaksanakan Gerakan Membangun Desa. Ketersediaan dan ketepatan tersebut mencakup kecukupan peralatan yang dimiliki desa, ketepatan teknologi yang digunakan, dan ketersediaan informasi dalam melaksanakan Gerakan Membangun Desa. Ketersediaan dan ketepatan tersebut diukur dengan skala Likert dengan rentang 1 (sama sekali tidak ada atau sama sangat tidak tepat) sampai 5 (sangat cukup atau sangat tepat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di atas menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran kebijakan (desa),

Gambar 6. Tingkat Kesesuaian Implementasi Gerbang Desa Berdasar Beragam Dimensi



Sumber: Informan Sasaran Kebijakan, 2023 diolah

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa ketersediaan dan ketepatan alat dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan Desa Cibuluh, Cemarajaya, dan Nagrog untuk meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menuju status desa yang lebih tinggi adalah kurang tersedia dengan ideal. Ketersediaan dan ketepatan alat dan teknologi rata-rata mencapai 2.33 dari skala 5.

KESIMPULAN

Berdasar hasil pengolahan data pembahasannya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan gerakan membangun desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, diindikasikan dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Pengembangan desa wisata melalui aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas serta penguatan Bumdes merupakan bentuk implementasi yang diyakini memberikan penguatan untuk peningkatan status desa menjadi meningkat.
2. Dimensi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Dari sisi produktivitas, implementasi kebijakan gerakan membangun desa masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana sebagai akibat dari keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana implementasi tersebut. Dimensi linearitas tercermin dalam pemenuhan pedoman standar gerakan membangun desa yang dielaborasi kedalam program Desa Juara, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan pemerintahan. Sedangkan dimensi efisiensi tercermin dalam kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa Provinsi Jawa Barat. Efisiensi implementasi telah tercapai yang diindikasikan oleh optimalnya peran pelaksana, pemanfaatan asset, dana, dan teknologi.

3. Implementasi kebijakan gerakan membangun desa dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM. Terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan penerima kebijakan dalam implementasi gerakan membangun desa; waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Dalam implementasinya, kecukupan waktu sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang sering dipersepsikan tidak konsisten (sering berubah-ubah), redundansi (tumpang tindih), dan kesulitan pemahaman di tingkat pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya masih terdapat persepsi di tingkat pelaksana kebijakan (para Kepala Desa) dan masyarakat bahwa peningkatan status desa akan menghilangkan peluang untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Faktor kehati-hatian yang berlebihan menghilangkan potensi kreativitas, kontra produktif dengan salah satu tujuan gerakan membangun desa yakni meningkatkan kreatifitas dan kemandirian desa. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi program, disamping akomodasi usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dana afirmasi untuk disebar kepada strata Desa Mandiri, Maju, Berkembang oleh Pemerintah Pusat.
4. Analisis SOAR terkait dengan implementasi kebijakan gerakan membangun desa menghasilkan sebelas rumusan strategi sebagai berikut:
 - a. Penguatan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.
 - b. Penguatan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan desa melalui kolaborasi dengan pendekatan peta helix.
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - d. Peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan desa dan Badan Permusyawaratan desa.
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Inovasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa secara
 - f. Pemanfaatan sumber daya teknologi dan informasi tanpa mengabaikan budaya masyarakat desa setempat.
 - g. Kolaborasi penta helix dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - h. Peningkatan SDM Aparatur desa untuk mewujudkan desa mandiri yang cerdas.

- i. Dukungan regulasi harus terimplementasi dalam kebijakan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara transparan.
- j. Peningkatan sumber daya aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
- k. Pemanfaatan sumber anggaran pembangunan dan pemberdayaan desa harus berdampak terhadap kemandirian desa.

Model implementasi kebijakan Muchlis Hamdi masih relevan untuk digunakan dalam perumusan kebijakan. Namun demikian dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat, model implementasi kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan kolaborasi (melalui skema penta helix), transparansi program (melalui edukasi masyarakat, komunitas mitra, dan pemantauan kebijakan), dan peningkatan inovasi untuk mewujudkan desa juara di Provinsi Jawa Barat. Maka, berdasarkan penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menguatkan pengawasan implementasi kebijakan gerakan membangun desa berkolaborasi dengan mitra pemangku kepentingan melalui model penta helix, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menguatkan peran pendamping masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; 3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan kompetensi SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 4) Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menyusun kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan inovasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kebijakan inovasi desa juara di Provinsi Jawa Barat; 5) Pemanfaatan sumber daya teknologi dan informasi baik oleh perumus kebijakan maupun pelaksana kebijakan gerakan membangun desa agar dilakukan tanpa mengabaikan budaya masyarakat desa setempat; 6) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten selaku pelaksana implementasi gerakan membangun desa perlu meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa untuk mewujudkan desa mandiri yang cerdas; 7) Dukungan regulasi baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten harus terimplementasi dalam kebijakan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara transparan; 8) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun rumusan standar dampak pemanfaatan sumber anggaran pembangunan dan pemberdayaan desa terhadap kemandirian desa; 9) Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Muchlis Hamdi, mencakup dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi, relevan dalam menyusun strategi kebijakan yang perlu

dirumuskan oleh Penentu Kebijakan Publik/Pemerintah. Dalam implementasinya, perlu melibatkan faktor kolaborasi, transparansi program, dan peningkatan inovasi untuk menjamin kebijakan diimplementasikan sesuai standar. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan parameter dan standar kolaborasi, transparansi dan inovasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19
- Amabile, T.M. 1983. *The Social Psychology of Creativity*. New York: Springer-Verlag.
- Barzelay, M. & Armajani, B.J. 1992. *Breaking through Bureaucracy*. In Shafritz, Jay M., Albert C.Hyde., & Sandra J.Parkes. 2004. *Classics of Public Administration*. Fifth edition. USA: Thomson & Wadsworth.
- Bintarto, R. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Alumnus.
- Calzada, I. (2016). (Un)Plugging smart cities with urban transformations: Towards multi-stakeholder city-regional complex urbanity. *Journal of Urban Studies and Social Sciences*, Vol. 6 No. 2), 37, 25-45.
- Carayannis, E.G & Campbell, D.F.J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and environment relate to each other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, Vol. 1 No. 1, 41-69.
- Carayannis, E.G., Barth, T.D. & Campbell, D.F.J. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 1, 1-12.
- Denzin, N. K. 1970. *The Research Act in Sociology*. Chicago: Aldine.
- Dunn, W.N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall. Terjemahan ISIPOL. Yogyakarta: Gajak Mada University Press.
- Eggers, W.D. & Singh, S.K. 2009. *The Public Innovator's Playbook: Nurturing bold ideas in government*. Deloitte. Harvard Kennedy School of Government.
- Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. *EASST Review*, Vol. 14 No. 1, 14-19.
- Fardani, I., Rochman, G.P., Akliyah, L.S. & Burhanuddin, H. 2021. *Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang*, Jurnal Resona, Vol. 5 No. 2, pp. 181-197.
- Frederickson, H.G. & Smith, K.B. 2003. *The Public Administration Theory Primer*. USA: Westview Press.
- Gerston, L.N. 1992 *Public Policy Making in A Democratic society: A Guide to CIVIC Engagement*. New York: M.E Sharp.
- Gilang, P. 2013. *Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara* (Studi Evaluasi PP No. 76 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pemekaran Desa). *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, Nomor 1, pp. 584-598.
- Glor, E.D. 1998. *What Do We Know About Enhancing Creativity and Innovation? A Review of Literature*. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, Vol. 3 No. 1, pp. 1-11.

Dedi Supandi, Sadu Wasistiono, Udaya Madjid, Andi Pitono: Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat

- Hayden, G. & Court, J. 2002. *Governance and Development: World Government Survey, Discussion Paper 1*. New York: United Nation University.
- Halibas, A.S., Sibayan, R.O. & Maata, R.L.R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 12*, 159-173.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik; Proses Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heap, B. 2015. *Smart Village: New Thinking for off-grid communities worldwide*. Research Associate of the Centre of Development Studies University of Cambridge.
- Irawan, S. & Hasan, H. 2015. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Istianto, B. 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ivanova, I. (2014). Quadruple helix systems and symmetry: a step towards helix innovation system classification. *Journal of the Knowledge Economy, Vol. 5 No. 2*, 357-369.
- Jaya, A. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Tugas Individu Semeseter Ganjil 2004*. Pengantar Falsafah Sains (PPS-702).
- Kanaha, I. 2019. *Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara*. *Journal of Public Administration and Local Governance*, pp. 94-104.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo; 1953. *Desa*; Tanpa Penerbit; Yogyakarta
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005. *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
-, 2008. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021. *Daftar Alokasi Gerakan membangun desa Provinsi Jabar 2021*.
- Labolo, M. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai,
- Legino, S. 2009. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Jakarta: Indonesia Press.
- Mintzberg, H., 1979. *The Structuring of Organizations a Synthesis of the Research*. Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Mulgan, G. & Albury, D. 2003. *Innovation in the Public Sector*. Working paper version 1.9, October, Strategy Unit UK Cabinet Office.
- Muslimin, A. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Nasir, N. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Gerakan membangun desa (Studi Kasus Di Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Ningrat, B.S. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- Osborne, S.P. & Brown, K. 2005. *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. New York: Routledge.

- Dedi Supandi, Sadu Wasistiono, Udaya Madjid, Andi Pitono: Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat
- Pariangu, U. 2014. Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam Bingkai UU Desa. *TRANSISI* 9: 49
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2019. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provisini Jawa Barat Tahun 2018-2023.
-, 2021. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021.
- Rasyid, R. 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru. Jakarta: Yarsif Watampone,
-, 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widia.
- Shafritz, J.M. & Russell, E.W. 1999. *Introducing Public Administration*. London: Longman.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Supriyanto, B. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Media Brilian.
- Suryono, A. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Syafiie, I.K. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tamin, F. 2004. *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta: Belantika.
- Thahir, B. 2020. *Penggunaan Gerakan membangun desa Tahun 2015-2018 dan Strategi Pendampingannya (Studi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2021.
- Tiza, A.L., Hakim, A. & Haryono. A.L. *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)*, Wacana– Vol. 17, No. 2, 2014, hlm. 58-67.
- Thoha, M. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Tonković, A.M., Veckie, E. & Veckie, V.W. (2015). Applications of Penta Helix Model in Economic Development. *Economy of Eastern Croatia Yesterday, Today, Tommorrow*, Vol. 4, 385-393.
- Wahab, S.A. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*. Surabaya: SIC.
- White, L.D. 1926 *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: McMillan.
- Widodo. 2013. *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang: Bayu Media.